

ANALISIS PENGAWASAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (STUDI KASUS DI DESA AMPIBABO UTARA)

Riyatno

Riyatno@yahoo.co.id

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims at analyzing the Monitoring of Development Activator Youth Scholar Program in Central Sulawesi (A Case Study in the village of Ampibabo Utara). The number of informants in the study are 8 people, namely three people of the Technical Team PSP3, the head section of Youth Leadership, Secretary of the village and two people of PSP3 participants also a civilian. The technique used in determining the informant is purposive by choosing informants purposively. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The result shows that Monitoring of Development Activator Youth Scholar Program in Central Sulawesi has already implemented but it has not been optimal. This is proved by the results of interviews viewed from the dimensions of direct inspection with indicators stating that monitoring implementation in the form of direct inspection is not carried out in accordance with the applicable rules, to be exact 2 times in a month, but it is carried out in 3 to 4 months with an unspecified time which is resulting the inactivity of PSP3 participants in the placement location in implementing the programs and also the report in place has not been established by PSP3 in accordance with what is assigned because the PSP3 participants have not prepared the report of work they performed. As for the dimensions of indirect inspection, it has been executed properly, which it can be seen from the indicators of written and oral reports.

Keywords: *Direct Inspection and Indirect Inspection*

Kedudukan desa selama ini cenderung hanyalah sebagai obyek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing-masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu sebagai kantor pemerintah desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan tugas administrasi. Relatif sedikit melihat atau menempatkan desa sebagai miniatur negara, dimana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simplifikasi kedudukan desa tersebut merupakan faktor dari terbatasnya perhatian dan alokasi sumber daya yang

diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Secara kuantitatif, cukup banyak aktivitas proyek pembangunan, namun belum signifikan menjawab persoalan kemiskinan, pengembangan aset masyarakat, bahkan sebaliknya sumber daya desa telah dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar. Misalnya dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Di samping rendahnya inovasi atau bahkan ketidaksesuaian jenis proyek dengan kebutuhan masyarakat, juga disebabkan faktor terbatasnya sumber daya terdidik yang mendedikasikan diri pada desa.

Implikasinya, desa nyaris tidak ada atau kurang memiliki aset (sumber daya alam, kelembagaan, zona ekonomi dan sumber daya manusia) yang memungkinkan untuk memulai dan mengembangkan kreasi dalam menjawab berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam mengurangi tekanan kemiskinan dan ketidakadilan di antara warga maupun antar wilayah. Salah satu masalah yang nampak adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas baik sebagai perencana maupun sebagai penggerak ataupun pelaksana untuk memacu perubahan sosial, ekonomi, politik di tingkat pedesaan. Walaupun selama ini telah ada personil terdidik yang mendampingi masyarakat, seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), program PIPP, PNPM, dan lain sebagainya baik dari dinas/instansi pemerintah ataupun Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), namun keberadaannya seringkali tidak terkait atau bersinergi dengan institusi desa dalam konteks perubahan struktural atas masalah kesenjangan dan ketidakadilan antara desa dan kota.

Dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi pemuda terdidik di pedesaan melalui upaya Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3). Dasar hukum kebijakan dari Program PSP3 ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER0200.E/MENPORA/6/2009 tentang Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana Prasarana Kepemudaan. Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan yang secara

langsung berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan pemuda desa, mengembangkan potensi sumber daya kepemudaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa, di samping sebagai upaya menumbuhkembangkan kepeloporan dan kemandirian para peserta PSP3.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan para PSP3 dalam melaksanakan programnya, pengawasan sebagai aspek yang sangat di butuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Ampibabo Utara. Pengawasan akan efektif jika tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan serta tidak menimbulkan kerugian yang besar dan pengawasan juga dapat membentuk lajunya suatu proses pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Saiful Anwar (2004:127) bahwa pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Program PSP3 yang sudah dijalankan, pada kenyataannya dan saat penelitian awal dilakukan bahwa program tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena ketidak aktifan peserta PSP3 di wilayah kerjanya dalam artian peserta PSP3 sering meninggalkan desa sampai berhari-hari bahkan sampai mingguan dan terkadang peserta PSP3 kembali ke desa tempat bertugas pada waktu menandatangani laporan bulanan oleh Kepala Desa. Pengawasan Program PSP3 bertujuan agar hasil program tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karna itu, pengawasan perlu mendapatkan perhatian utama sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya agar sasaran program PSP3 tercapai, karena hal ini menyangkut kehidupan orang banyak dan untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan hasil observasi awal, bahwa program PSP3 secara *Fisik/Non Fisik* terbengkalai dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Pengawasan Langsung oleh

Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tidak dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku yaitu 2 bulan sekali, sehingga di dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana pun tertunda dan waktu pelaksanaannya juga tidak ditentukan yang mengakibatkan ketidak aktifan peserta PSP3 dilokasi penempatan dalam melaksanakan programnya. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik membahasnya dengan judul *Analisis Pengawasan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan di Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus di Desa Ampibabo Utara)*.

METODE

Jenis penelitian adalah desain kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kirk dan Miller (dalam Lexy J. Moleong, 2010 : 6) mengemukakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi penelitian yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terbagi dalam tiga bagian yaitu observasi, yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai obyek dan subyek yang akan diteliti (Nasir, 1999 : 212), wawancara, yaitu Menurut Narbuko dan Achmadi (1999:83), Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih menatap muka mendengarkan secara

langsung informasi -informasi atau keterangan dan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan dokumentasi yaitu menurut H. B. Sutopo (2002:55) mengemukakan bahwa, dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas. Informan berjumlah 7 Orang ditentukan dengan cara *purposive*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, bahkan, dapat menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan program kerja dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebelum menganalisis pengawasan, terlebih dahulu peneliti menjelaskan bahwa sasaran pengawasan disini ditunjukkan kepada program dan perintisan usaha yang dilaksanakan oleh PSP3, pada khususnya program yang diawasi tersebut tidak mempunyai dana dalam bentuk apapun yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, kecuali bersumber dari masyarakat desa itu sendiri. Sedangkan untuk perintisan usaha produktif mempunyai dana tersendiri yang disebut dengan Dana Awal yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga

melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah kepada tiap peserta PSP3 dan ini merupakan bagian dilaksanakannya pengawasan.

Program PSP3 secara keseluruhan sudah dijalankan tetapi kesemuanya juga belum terselesaikan. Untuk itu perlu dikemukakan tanggapan-tanggapan informan mengenai proses Pengawasan Program PSP3 yang secara rinci ditinjau dari tiap-tiap Dimensi/Indikator yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

1) Pengawasan Langsung

Bentuk pengawasan langsung yakni apabila pelaksana pengawasan melakukan pemeriksaan langsung pada program atau pekerjaan baik dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun investigatif. Hal ini dimaksudkan agar segera dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan bila di temukan masalah atau kendala dilapangan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pengawasan langsung melalui Inspeksi Langsung, Sarana, dan Tindak Lanjut pengawasan.

a) Inspeksi Langsung

Dalam rangka pencapaian Program PSP3 untuk kesempurnaan hasil, maka Bidang Kepemudaan melakukan pengawasan melalui inspeksi yang dilihat dari waktu rencana pengawasan. Pengawasan langsung dengan meninjau langsung kelokasi penempatan PSP3 bertugas di sini bersifat memeriksa langsung dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh PSP3 di Desa Ampibabo Utara berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Program PSP3 bahwa pengawasan dilaksanakan minimal 2 bulan sekali, namun kenyataannya pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa

pengawasan oleh Bidang Kepemudaan sering dilaksanakan 3 bulan dan bahkan sampai 4 bulan sekali. Pendapat tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu informan yaitu peserta PSP3 yaitu Hartono, S.Sos menyatakan bahwa :

“Belum, selama kami bertugas di desa ini pengawasan tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada, kadang pengawasan dilaksanakan 3 sampai 4 bulan sekali. (Wawancara: 17 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh peserta PSP3 di atas, jelaslah bahwa pengawasan yang dilaksanakan bidang kepemudaan tidak berdasarkan aturan pelaksanaan pengawasan. Pendapat dan penjelasan di atas dianggapi kembali oleh peserta PSP3 yang bernama Abd. Evan, S.Pd tentang ketidak sesuaian aturan pelaksanaan pengawasan, ia mengatakan bahwa :

Pengawasan yang dilakukan tidak sesuai aturan, tetapi dilaksanakan 3 sampai 4 bulan sekali dan itu terjadi karena lambatnya dana pengawasan dicairkan sehingga pelaksanaan pengawasan tertunda dan juga pelaksanaannya yang tidak ditentukan waktunya. (Wawancara: 17 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, sangat jelas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bidang kepemudaan atau Tim Teknis PSP3 belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pengawasan tidak memenuhi aturan yang berlaku yang disebabkan beberapa faktor kendala diantaranya yaitu proses pengawasan yang tidak ditentukan waktunya dan lambatnya dana pengawasan, serta tidak adanya sanksi tegas oleh pimpinan kepada para pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Tim Teknis PSP3 yaitu Bapak Adhan Judhan, S.Sos selaku Kasi Bina

Generasi Muda mengenai masalah waktu pelaksanaan pengawasan, mengatakan bahwa :

“Tidak, pengawasan yang kami dilakukan tidak tertentu dan juga tidak ditentukan waktunya. Hal ini kami lakukan karena ingin mengetahui ada tidaknya peserta PSP3 di tempat tugasnya dan memastikan program tersebut dijalankan atau tidak. (Wawancara : 20 November 2014).

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dilakukan karena tidak tertentu waktu pelaksanaannya sehingga program PSP3 pun belum berjalan dengan baik. Untuk itu juga perlu peran serta pimpinan untuk selalu memberikan motivasi, insentif serta panisemen kepada pelaksana pengawasan agar melaksanakan aturan yang ada. Dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan, maka dapat mengetahui kebenaran dan situasi dilapangan, karena pengawasan atau peninjauan tersebut secara otomatis pelaksanaan program PSP3 akan diketahui perkembangannya dan apabila ditemukan hambatan-hambatan maka segera di tindak lanjuti. Hasil wawancara di atas yang menyatakan bahwa pengawasan belum efektif atau belum maksimal dipertegas kembali oleh Bapak Muslimin, SP selaku staf Kasi Bina Generasi Muda sekaligus sebagai Tim Teknis PSP3, mengatakan bahwa:

“Pengawasan yang kami lakukan belum efektif, itu dikarenakan kami hanya sebatas menanyakan kepada peserta PSP3 apakah program tersebut sudah dilaksanakan dengan semestinya atau belum. (Wawancara: 20 November 2014).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, bahwa Tim Teknis PSP3 dalam melakukan pengawasan hanya sebatas menanyakan kepada peserta PSP3 tentang apakah program sudah dilaksanakan dengan semestinya, bukan dilihat dari proses pelaksanaan programnya dan

pelaksanaan pengawasan pun tidak di beritahukan kepada peserta PSP3. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan ingin mengetahui juga kendala apa yang ditemukan PSP3 saat melaksanakan programnya.

Penjelasan di atas mengenai program harus dilaksanakan dengan semestinya ditanggapi lebih lanjut oleh Bapak Aslam Alex, S.Sos selaku Kasi Bina Organisasi Kepemudaan sekaligus juga sebagai Tim Teknis PSP3, mengatakan bahwa:

“Benar, kami melakukan pengawasan hanya sebatas memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan semestinya, sekaligus ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi PSP3 dalam pelaksanaan seluruh program tersebut”. (Wawancara: 20 November 2014).

Dengan menyimak hasil wawancara di atas bahwa untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu program tersebut maka bidang kepemudaan harus melakukan pengawasan sesuai aturan yang ada, jika pengawasan dilakukan dengan baik maka program yang dihasilkan pun akan baik dan begitu pun sebaliknya. Pengawasan yang dilakukan adalah mencakup pada seluruh program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Hasil wawancara di atas di tanggapi lebih lanjut lagi oleh Sekretaris Desa Ampibabo Utara, yaitu Bapak Abd. Majid, SH mengatakan bahwa:

Benar, bahwa pengawasan dilakukan pada seluruh program PSP3 untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program tersebut, tetapi saya sendiri sering mengecek dan mengawasi semua program-program yang sudah dilaksanakan oleh peserta PSP3 tersebut. (Wawancara, 26 November 2014).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh sekretaris desa bermaksud untuk mengecek seluruh program yang sudah atau yang belum dilaksanakan oleh PSP3 dengan

tujuan membantu Tim Teknis PSP3 ketika mereka tidak melakukan pengawasan dan kadang pelaksanaan pengawasan tertunda. Penjelasan di atas dipertegas kembali oleh peserta PSP3, mengatakan bahwa :

Ya benar, program yang kami laksanakan sering diawasi sekretaris desa atau aparat desa lainnya. Hal ini dikarenakan Tim Teknis PSP3 kurang melakukan pengawasan dan kami juga biasa dibantu oleh aparat desa untuk melaksanakan program yang belum selesai dilaksanakan. Menyangkut pelaksanaan pengawasan, kita sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan karena tidak ada pemberitahuan dari Tim Teknis. (Wawancara, 26 November 2014).

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan di atas dapat disimpulkan, bahwa sangatlah jelas pengawasan langsung yang dilihat dari waktu dan rencana pengawasan sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pengawasan tidak sesuai aturan yang berlaku tetapi dilaksanakan 3 sampai 4 bulan sekali, dan pelaksanaannya pun juga tidak yang ditentukan waktunya dan masalah ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan efektivitas pengawasan.

b) Sarana Pengawasan

Untuk dapat melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien harus mengetahui secara tepat sarana sekaligus yang akan menjadi sasaran dalam pengawasan. Pengawasan merupakan suatu tahapan penting dalam organisasi, dalam fungsi manajemen untuk mencapai sebuah kinerja yang baik. Sarana pengawasan disini dilihat/diukur dari pencatatan laporan, pencatatan laporan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan mingguan yang berbentuk ringkasan program PSP3 dan disampaikan langsung pada pelaksana pengawasan/Tim Teknis PSP3 di saat melakukan inspeksi

langsung. Di mana dalam hal ini peserta PSP3 langsung menyampaikan berbagai macam program yang sedang dilaksanakan dan bagaimana hasil yang telah dicapai dari pekerjaan tersebut.

Selain itu, laporan di tempat ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi ke depan bagi bidang kepemudaan yang melakukan pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerja PSP3 agar lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Berdasarkan observasi awal bahwa di saat Tim Teknis PSP3 inspeksi langsung mereka juga meminta ringkasan laporan mingguan, tetapi peserta PSP3 belum merekap atau menyusun laporan mingguan tersebut. Pendapat di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Adhan Judhan, S.Sos selaku Kasi Bina Generasi Muda sekaligus sebagai Tim Teknis PSP3 mengatakan bahwa:

“ia benar, di saat melakukan pengawasan, kami juga meminta rekap laporan ditempat, karena laporan itu merupakan salah satu laporan yang efisien karena dapat membantu sejauh mana pekerjaan itu terlaksana, tapi saat kami meminta laporan itu peserta PSP3 belum sempat menyiapkannya karena belum merekap hasil kerja mereka. (Wawancara, 14 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa di saat dilakukannya pengawasan, Tim Teknis PSP3 juga meminta laporan ditempat/mingguan karena dianggap penting dan diperlukan agar dapat mengetahui sejauh mana program tersebut terlaksana dan bagaimana perkembangannya serta laporan ini dilaksanakan secara langsung antara peserta PSP3 dengan pelaksana/ Tim Teknis PSP3. Pendapat di atas, ditanggapi lebih lanjut lagi berdasarkan wawancara dengan Bapak Muslimin, SP selaku staf Kasi Bina Generasi Muda sekaligus juga sebagai Tim Teknis PSP3, mengatakan bahwa:

Tidak, Laporan di tempat itu dilaksanakan secara langsung antara PSP3 dan Tim Teknis PSP3 mengenai hal-hal apa saja yang sedang dilakukan pada waktu tersebut, jika belum dilakukan maka itu merupakan salah satu masalah. (Wawancara, 14 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa laporan ditempat ini berfungsi untuk membangun komunikasi antara PSP3 dan Tim pelaksana pengawasan. Dengan adanya laporan ditempat ini kesalahan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki demi meningkatkan produktivitas kerja PSP3 dilapangan untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, untuk itu diharapkan kepada peserta PSP3 harus menyiapkan laporan tersebut sebelum Tim Teknis PSP3 memintanya, jika tidak disiapkan itu merupakan menjadi salah satu masalah di dalam proses pengawasan karena laporan mingguan itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi nantinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfred selaku Kasi Kepemimpinan Pemuda, sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis PSP3 tentang ketidaksiapan laporan ditempat oleh peserta PSP3 mengatakan bahwa:

“Menurut saya itu merupakan salah satu masalah, karna laporan ditempat dijadikan salah satu bahan evaluasi kedepannya. Peserta PSP3 tidak membuat laporan ditempat yang ditugaskan kepada mereka. Sebenarnya laporan itu sudah harus disiapkan sebelum dilakukannya pengawasan, dengan begitu saat pengawasan berlangsung PSP3 sudah siap dan bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. (Wawancara, 14 Januari 2015).

Dari wawancara di atas bahwa laporan di tempat terjadi pada saat adanya inspeksi langsung oleh pelaksana pengawasan, dimana laporan tersebut diperlihatkan kepada Tim Teknis PSP3 tentang program apa saja yang sedang

dilakukan atau yang belum dilakukan. Dari hasil pengamatan dan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa laporan di tempat atau laporan mingguan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan peserta PSP3 belum merekap hasil kerja mereka ke dalam laporan mingguan.

Dengan adanya laporan ditempat tersebut, diharapkan dapat menjadikan proses pengawasan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat juga mendorong peserta PSP3 untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan programnya dan dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan dapat menciptakan ketertiban di lingkungan kerja PSP3. Pembahasan penulis terhadap ketiga bentuk dari pengawasan langsung tersebut dapat dijelaskan bahwa, pengawasan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran.

c) Tindak Lanjut Pengawasan

Yang dimaksud dengan melakukan tindak lanjut disini adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap program PSP3, tetapi dilakukan bila ditemukan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan pada saat pengawasan dilakukan. Temuan masalah tersebut akan bermanfaat bagi tujuan pengawasan bila diiringi dengan tindak lanjut yang mengembangkan fungsi pengawasan. Dalam hal ini tindak lanjut dilihat/ diukur dengan melakukan koreksi/perbaikan agar masalah atau penyimpangan dapat menjadi lebih baik.

Kegiatan koreksi bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada, dengan adanya koreksi maka kesalahan

atau kekurangan dalam pelaksanaan program PSP3 dapat diperbaiki. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Adhan Judhan, S.Sos selaku Kasi Bina Generasi Muda sekaligus juga sebagai Tim Teknis PSP3 mengatakan bahwa:

“Ya benar di setiap desa yang ditentukan proses kegiatan koreksi sangat diperlukan terutama pada program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kami Tim Teknis PSP3 dalam hal ini langsung melakukan pengawasan pada program oleh, bila ditemukan masalah maka langsung diperbaiki”.

Pengawasan langsung sangat berperan penting untuk menilai dan mengawasi bagaimana tingkat kinerja PSP3 dalam menjalankan program dan pekerjaan dilapangan. Selain itu koreksi langsung di tempat ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan secara singkat kepada peserta PSP3 apa yang belum di mengerti tentang pelaksanaan program karena keahlian dan pengetahuan yang mungkin masih kurang. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Muslimin, SP selaku staf Kasi Bina Generasi Muda sekaligus juga sebagai salah satu Tim Teknis PSP3, mengatakan:

“Koreksi langsung yang kami lakukan bila saat di dalam melakukan inspeksi langsung karena ingin menemukan masalah dalam program tersebut, dan kami membantu memberi solusi pada masalah yang ada. (Wawancara, 16 Desember 2014).

Dari hasil wawancara pada informan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa koreksi langsung/ditempat adalah salah satu bentuk dari pengawasan langsung dan dilakukan ketika ditemukan masalah dalam program yang dijalankan oleh PSP3 tersebut serta koreksi langsung ini dapat memberikan pelajaran singkat dan ingin mengetahui apa saja yang

menjadi kendala pada proses pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Tim PSP3 dan yang lainnya juga memberikan pengarahan terhadap peserta PSP3 karena dalam proses pelaksanaan program demi tujuan yang diharapkan harus memiliki kemampuan berpikir.

Dalam kaitannya dengan apakah PSP3 bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang di berikan atau tidak, sehingga pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya koreksi langsung atau pengamatan dari pelaksana pengawasan. Berdasarkan Wawancara dengan bapak Aslam Alex, S.Sos selaku Kasi Bina Organisasi Kepemudaan sekaligus juga sebagai Tim Teknis PSP3, mengatakan bahwa:

“Memang koreksi langsung sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja PSP3 agar terhindar dari masalah, dalam hal ini kami selaku pelaksana pengawasan melakukan koreksi juga pada PSP3 yang ditugaskan di kecamatan lainnya, ketika menemukan masalah, kami langsung mengatasinya”. (Wawancara, 19 Desember 2014).

Dengan menyimak hasil wawancara diatas, bahwa koreksi langsung di berlakukan di seluruh tempat dimana peserta PSP3 itu bertugas dan tujuan koreksi langsung ini dilakukan diantaranya adalah untuk dapat meningkatkan kinerja PSP3 dan menghindari terjadinya masalah dilapangan. Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas, bahwa pengawasan berupa koreksi langsung yang dilakukan oleh bidang kepemudaan sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari ketika inspeksi langsung kemudian di barengi dengan koreksi langsung oleh pelaksana pengawasan/Tim Teknis PSP3, atas program PSP3 yang sudah diketahui hasilnya.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Bagian Kepemudaan sebagai pelaksana fungsi pengawasan, melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara memonitoring atau memantau hasil kerja PSP3 dilokasi penempatan melalui laporan hasil kegiatan PSP3 untuk melihat dan menilai sejauh mana kinerja peserta PSP3 dilapangan. Dalam pengawasan tidak langsung ini yang dituntut adalah kesadaran dari pribadi masing-masing peserta PSP3 itu sendiri dan tidak adanya kebiasaan untuk mengabaikan pekerjaannya, yang dimaksud ialah apabila ada kunjungan dari pelaksana pengawasan/Tim Teknis PSP3 melakukan pengawasan untuk melihat perkembangan program, baru berada ditempat dan bekerja tetapi begitu selesai kunjungan, peserta PSP3 juga tidak ada ditempat, maka pekerjaan diabaikan dan ditinggal.

Untuk mengetahui Aktivitas Pengawasan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan melalui Pemeriksaan Dokumen Laporan Pelaksanaan Program PSP3, diperlukan tanggapan informan mengenai hasil wawancara tentang laporan Tertulis maupun Lisan.

a) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh bidang kepemudaan atau Tim Teknis PSP3 melalui buku laporan hasil kerja PSP3 yang diketahui dan ditanda tangani langsung oleh kepala desa atau sekretaris desa dan dilaporkan setiap bulan. Dari hasil laporan tersebut dapat diketahui apa saja kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan kedepannya dapat diawasi sehingga nantinya proses kelangsungan kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan

Tim Teknis PSP3, yaitu bapak Adhan Judhan, S.Sos selaku Kasi Bina Generasi Muda mengatakan bahwa:

“ya benar, dimana pengawasan tidak langsung ini berupa laporan tertulis dari PSP3 yang isinya tentang seluruh program yang sudah atau yang belum dilaksanakan dalam waktu sebulan dan laporan ini berguna untuk sebagai bahan acuan untuk melakukan evaluasi selanjutnya”. (Wawancara, 19 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dengan adanya laporan tertulis dari peserta PSP3, Tim Teknis PSP3 tidak perlu turun langsung atau mendatangi lokasi PSP3 bertugas, cukup menunggu dan menerima laporan dikantor pada saat waktu yang telah ditentukan karena Tim teknis PSP3 sudah memberikan tugas khusus untuk membuat laporan bulanan. Pendapat diatas di pertegas kembali oleh Bapak Muslimin, SP selaku staf Kasi Bina Generasi Muda sekaligus sebagai Tim Teknis PSP3, mengatakan bahwa:

“Tidak, kami memberi tugas kepada PSP3 untuk membuat laporan tertulis yang dilakukan setiap bulan sekali sebagai bahan untuk menilai dan menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para PSP3 dilapangan”. (Wawancara, 19 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pengawasan tidak langsung dilakukan setiap bulan sekali, dimana laporan tertulis tersebut di berikan kepada Tim Teknis PSP3 beserta sof copynya yang nantinya akan di kirim langsung ke Kementerian Dinas Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai syarat saat menerima intensif atau gaji PSP3. Pendapat di atas diperjelas kembali oleh Tim Teknis PSP3 yaitu Bapak Aslam Alex, S.Sos

selaku Kasi Bina Organisasi Kepemudaan mengatakan bahwa:

“ya benar, laporan tertulis yang dibuat oleh PSP3 yang ditujukan kepada kami yang kemudian akan ditindak lanjuti lebih lanjut bila ditemukan masalah dan laporan itu syarat utama untuk menerima gaji para PSP3. (Wawancara, 19 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa pengawasan tidak langsung ini berupa laporan tertulis oleh PSP3 yang disampaikan kepada Tim Teknis PSP3, berupa seluruh program yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, disimpulkan bahwa laporan tertulis sudah dijalankan dengan baik dan dibuat oleh peserta PSP3 setiap bulannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tim Teknis PSP3.

b) Laporan Lisan

Laporan secara lisan yang dimaksud disini adalah laporan yang disampaikan oleh PSP3 melalui Sekretaris Desa yang nantinya akan disampaikan kepada pelaksana pengawasan atau Tim Teknis PSP3 melalui alat komunikasi handpone, dengan tujuan mengetahui program PSP3 dan kendala-kendala yang ditemukan dilapangan.

Dengan adanya laporan secara lisan tersebut maka pelaksana pengawasan atau Tim Teknis PSP3 merasa terbantu dan akan mudah melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan oleh PSP3. Berdasarkan observasi awal oleh peneliti bahwa laporan secara lisan sudah dilaksanakan oleh PSP3 dengan baik, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan

yaitu Bapak Adhan Judhan, S.Sos selaku Kasi Bina Generasi Muda sekaligus sebagai Tim Teknis PSP3 mengatakan bahwa:

“Laporan secara lisan yang disampaikan kepada kami melalui sekretaris desa sudah dilaksanakan dan kami terima langsung, dimana laporan secara lisan tadi kami dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil selanjutnya”. (Wawancara, 23 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa laporan secara lisan sudah dilaksanakan, dimana laporan tersebut melalui media komunikasi handpone dengan maksud mendapatkan informasi tambahan tentang pelaksanaan program PSP3 dan laporan ini juga dijadikan bahan evaluasi selanjutnya. Hasil wawancara diatas, dipertegas kembali oleh Tim Teknis PSP3 yaitu Bapak Aslam Alex, S.Sos selaku Kasi Bina Organisasi Kepemudaan mengatakan bahwa:

“Kami biasanya sering menelpon langsung pada kepala desa atau sekretaris desa untuk menanyakan perkembangan program, dan kadang juga disampaikan pada saat rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala-kepala desa”. (Wawancara, 23 Januari 2015).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa laporan lisan ini disampaikan langsung oleh sekretaris desa karena laporan ini walaupun hanya lewat handpone, dapat membantu pelaksana pengawasan atau Tim Teknis PSP3 untuk mengetahui perkembangan program itu sendiri. Pendapat di atas, diperjelas kembali oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak Abd. Majid, SH mengatakan bahwa:

“Ia benar, laporan secara lisan ini tidak disampaikan secara langsung

oleh PSP3, melainkan sering melalui saya sendiri dimana Tim Teknis PSP3 menelpon langsung untuk memberikan laporan perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh peserta PSP3". (Wawancara, 23 Januari 2015).

Dengan adanya hasil wawancara diatas, bahwa sangatlah jelas laporan lisan ini tidak disampaikan secara langsung oleh PSP3, melainkan melalui sekretaris desa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa laporan lisan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari adanya laporan yang disampaikan oleh sekretaris desa kepada pelaksana pengawasan atau Tim Teknis PSP3 yang dilakukan setiap bulan setelah laporan PSP3 secara tertulis masuk dan ketika juga saat rapat evaluasi kurang dilakukan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mensajikan hasil kesimpulan bahwa Pengawasan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan di Desa Ampibabo Utara sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini terbukti dari hasil wawancara Pengawasan Langsung dengan dimensi Inspeksi Langsung yang dilihat/diukur melihat aturan rencana pengawasan, menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan langsung tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 2 bulan sekali, tetapi sering dilaksanakan 3 sampai 4 bulan sekali dengan waktu yang tidak ditentukan sehingga mengakibatkan ketidak aktifan peserta PSP3 di lokasi penempatan dan dimensi sarana pengawasan dengan tolak ukur Laporan mingguan pun belum dilaksanakan oleh PSP3 sesuai dengan apa yang ditugaskan karena peserta PSP3 belum merekap hasil

kerja yang mereka laksanakan. Sedangkan untuk dimensi Pengawasan Tidak Langsung sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat di dilihat dari dimensi pelaksanaan kegiatan dengan aspek Laporan Tertulis dan Laporan secara Lisan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi rekomendasi penulis yaitu diharapkan kepada Bidang Kepemudaan yang di berikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, agar menjalankan pengawasan sesuai aturan yang berlaku yaitu pengawasan harus dilakukan 2 bulan sekali sehingga peserta PSP3 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan, bidang kepemudaan perlu terus memberikan motivasi kepada peserta PSP3 agar dapat memperhatikan dan membuat laporan mingguan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebelum pengawasan dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selanjutnya penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan jurnal ini dan penyelesaian studi pada Program Magister Administrasi Publik adalah berkat motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua *Ayahanda dan Ibunda* tercinta *Armin Labido dan Maryam Lembah, S.Pd* dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan terima kasih pula kepada pembimbing Dr. Abu Tjaiya, M.Si, dan Dr. Dirjda Jahya, M.Si yang selalu memberikan masukan serta penuh kesabaran telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini sebagaimana mestinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Saiful. 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press
- Hardius Usman, dan Nasution Mustafa Edwin. 2008, *Proses Penelitian Kuantitatif*, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasir. 1999, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana Prasarana Kepemudaan
- Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER 200. E/ MENPORA / 6 / 2009 tentang Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan
- Siagian Sondang P. 2008, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan keenambelas, Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan